



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BPBD DIY
Jalan Kenari No. 14A, Semaki, Umbulharjo,
YOGYAKARTA, 55166
Telp. (0274)555836
Fax. (0274)554206
email: BPBD@jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Kepala Pelaksana BPBD DIY,



Drs. NOVIAR RAHMAD., M.Si.
NP. 19701116 199003 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BPBD Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BPBD yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BPBD Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja BPBD DIY tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pada BPBD DIY yakni **“Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana ”**:
 - Diukur dengan ***Indeks Ketahanan Daerah*** berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
 - Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja BPBD DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan SDGs / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) DIY.



- Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 80; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi 80. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

- a) Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perubahan pola pemanfaatan lahan dan perubahan iklim.
- b) Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan masih memerlukan penguatan pada semua aspek kapasitas.
- c) Dinamika jenis ancaman bencana yang dihadapi, termasuk kelanjutan penanganan pandemi covid-19 di tahun 2022. Pandemi kali ini termasuk jenis bencana non-alam, kategori bencana dengan karakteristik *slow on- set disaster*, tidak bisa dipastikan kapan akan berakhir, termasuk mengakhiri status tanggap daruratnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan mandat BPBD dan pencapaian target-target kinerja BPBD ke depan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	iiv
DAFTAR DATA DAN GAMBAR	v
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	3
1.3 Isu-Isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	9
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	15
BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja BPBD DIY	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	24
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	24
3.2 Sasaran1. Kinerja Perangkat Daerah	26
3.3 Sasaran2. Capaian Kinerja Lainnya	37
3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah	45
3.5 Efisiensi Anggaran	46
3.6 Inovasi	48
3.7 Pogram Penunjang	51
3.8 Pogram Lintas Sektor	51
BABIV PENUTUP	53
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I.1.4.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi
Tabel I.1.4.2	Sarana- Prasarana
Tabel I.1.4.3	Anggaran Tahun 2023
Tabel I.1.5.1	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Tabel II.1	Sasaran Kinerja BPBD DIY Tahun 2023
Tabel II.2	Indikator Pendukung Sasaran Kinerja
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023
Tabel II.5	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023
Tabel II.6	Sasaran dan Target Perjanjian Kinerja BPBD DIY Tahun 2023
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2023
Tabel III.3	Gambaran Umum Nilai Kapasitas Daerah sebagai Meta Indikator Kinerja
Tabel III.4	Hubungan Sasaran, indicator dan meta indikator
Tabel III.6	Sasaran, Indikator dan Meta Indikator
Tabel III.7	Formulasi Perhitungan Nilai Kapasitas Daerah
Tabel III.8	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
Tabel III.10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Tabel III.11	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023
Tabel III.3.1	Capaian Kinerja OPD dengan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2023
Tabel III.3.2	Capaian Kinerja Lainnya yang diampu oleh BPBD DIY
Tabel III.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Tabel III.3.4	Inventarisasi Lintas Sektor

Daftar Gambar

- Gambar I.1. Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
- Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis Struktur BPBD DIY
- Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Daerah DIY
- Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP
- Gambar II.2. Co Reforms Space
- Gambar III.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP
- Gambar III.2. Sistem informasi kebencanaan InaWARE
- Gambar III.3. Sistem informasi kebencanaan DIBI
- Gambar III.4. Sistem informasi kebencanaan PAMOR

BAB I. Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi..

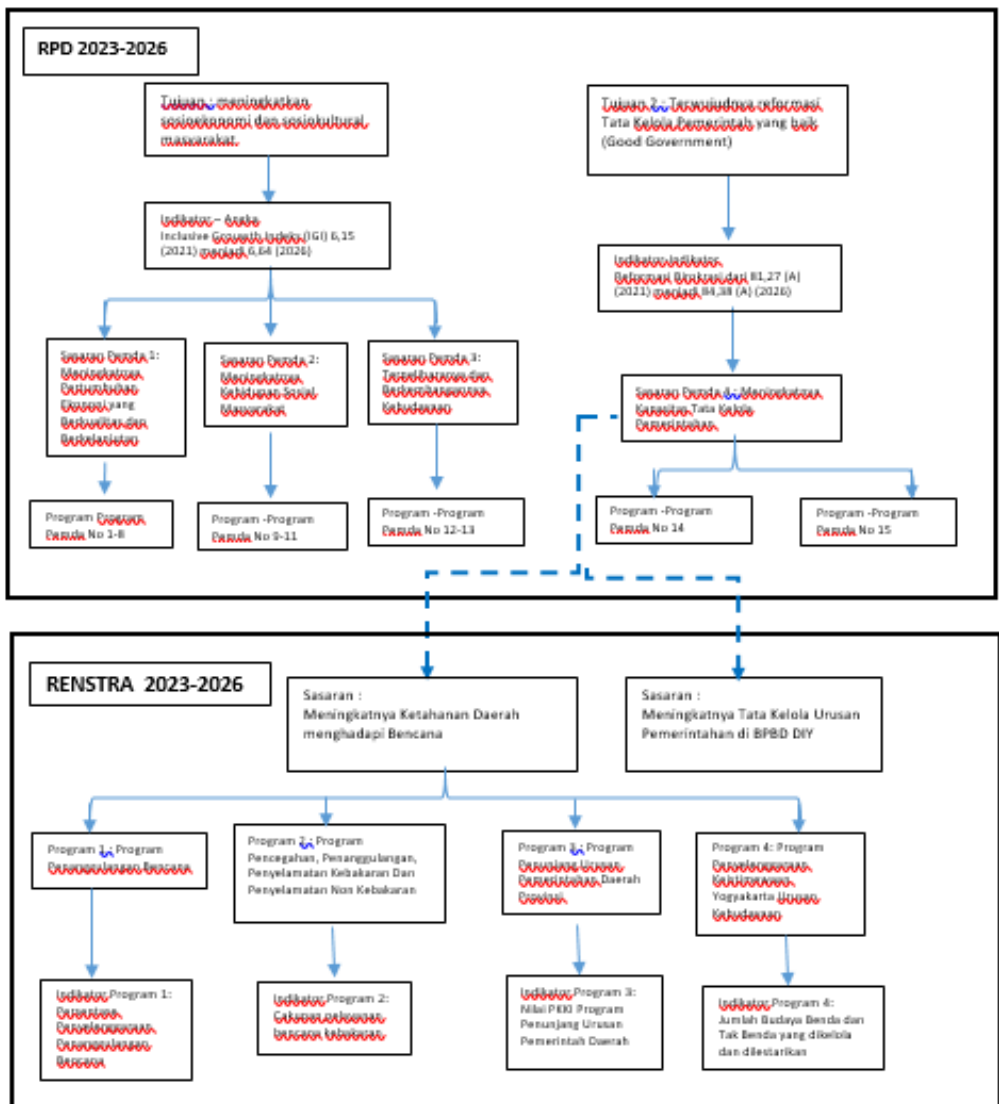
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan

Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026 dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar I.1 Cascading Kinerja

Sumber: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2023-2026



Gambar I.2 Struktur Organisasi BPBD DIY dan Peta Proses Bisnis



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja OPD Pemerintah daerah dalam RPD Tahun 2023 -2026, BPBD DIY memiliki tugas dan fungsi yang menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut :

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut :

- Penyusun program kerja Badan;
- Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah;
- Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- Penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana dan prosdur tetap penanganan bencana;
- Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan;
- Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- Pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota;
- Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan; dan
- Pelaksanaan kewajiban lainnya seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tusi Damkar.

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Organisasi dibagi habis ke dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi BPBD DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "Menurunkan risiko bencana", antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur;
- e. Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non- pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;

- h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
 - i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
 - j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Bidang Penanganan Darurat
- a. Melakukan pencegahan dan antisipasi terkait risiko bencana yang kemungkinan terjadi selama tahun 2023 seperti pada aktivitas Gunung Merapi.
 - b. Mitigasi dalam menghadapi cuaca dan iklim ekstrim.
 - c. Melakukan tindak lanjut status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten, serta mempercepat vaksinasi dan pengobatan terhadap hewan sakit terdampak PMK.
 - d. Melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan/puncak musim hujan Tahun 2022/2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bidang Logistik dan Peralatan
- Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standard pelayanan.
- a. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
 - b. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana.

- c. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.
 - d. Meningkatkan sinergitas penanganan pasca bencana lintas sektor.
5. Kegiatan Rapat Kerja Teknis TRC menghasilkan beberapa kesimpulan yang terdiri dari :
- a. TRC kab/kota bekerja sesuai dengan Tupoksinya, yakni Kaji Cepat sesuai dengan peraturan yang ada; Bahwa TRC merupakan ujung tombak BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kab/kota; Perlunya kesamaan persepsi, komunikasi dan koordinasi TRC dengan BPBD maupun lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan baik personil maupun peralatannya; Alur penanganan bencana sudah terintergrasi dan perlu ditingkatkan secara professional baik antar kab/kota maupun provinsi.
 - b. Meningkatkan kualitas dan semangat bagi unsur penanggulangan bencana di dalam pelaksanaan tugas dimana muaranya adalah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan secara cepat,

- c. tepat dan aman; Masih terdapat kendala dalam penanggulangan bencana di Kab. Gunungkidul; Perlunya formula yang tepat untuk komunikasi dan koordinasi BPBD melalui TRC dengan multi pihak dan lintas sektor; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan maupun personil dari Provinsi ke Kab/Kota.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1				1	1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5					5	3	2			3	2
	2. Pengawas	2					2	2				1	1
	3. Pelaksana	24					24	3	12	2	7	16	8
C.	Jabatan Fungsional	12					12	9	3			6	6
	Jumlah												

Sumber: Data Kepegawaian per 31 Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 17 orang (39,65%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (40,90%), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 2 orang (5,54%) dan terakhir SMA 7 orang (16,90%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 27 orang (60,46%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 17 orang (39,65%).

Masih membutuhkan tambahan personil pada Jabatan Substantif yakni Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 1 orang, dan Pengelola Sistem dan Jaringan kosong 1 orang sehingga pada Subbag Program hanya terdiri dari 2 (satu) orang Perencana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.

Tabel 1.4.2 Sarana-Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	3.185	62.801.786.917,69
			01		TANAH	0	0
			01	01	TANAH	0	0
			02		PERALATAN DAN MESIN	2.933	46.390.504.073,69
			02	01	ALAT BESAR	65	3.477.915.918,00
			02	02	ALAT ANGKUTAN	63	19.253.6454.326,00
			02	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	91	285.697.000,00
			02	04	ALAT PERTANIAN	98	145.500.000,00
			02	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.152	3.501.991.339,02
			02	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	472	13.130.003.156,00
			02	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	180	660.887.954,94

			02	08	ALAT LABORATORIUM	78	536.031.004,73
			02	09	ALAT PERSENJATAAN	236	746.610.800,00
			02	10	KOMPUTER	259	1.906.453.394,00
			02	11	ALAT EKSPLORASI	0	0
			02	12	ALAT PENGEBORAN	0	0
			02	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
			02	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
			02	15	ALAT KESELAMATANKERJA	221	2.104.277.300,00
			02	16	ALAT PERAGA	0	0
			02	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
			02	18	RAMBU - RAMBU	9	80.175.000,00
			02	19	PERALATAN OLAHRAGA	8	599.046.675,00
			03		GEDUNG DAN BANGUNAN	14	9.308.799.350,00
			03	01	BANGUNAN GEDUNG	14	9.308.799.350,00
			03	02	MONUMEN	0	0
			03	03	BANGUNAN MENARA	0	0
			03	04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0
			04		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	15	6.638.348.700,00
			04	01	JALAN DAN JEMBATAN	2	1.485.268.000,00
			04	02	BANGUNAN AIR	1	419.397.900,00
			04	03	INSTALASI	5	4.406.182.000,00
			04	04	JARINGAN	7	327.500.800,00

			05		ASET TETAP LAINNYA	223	419.145.000,00
			05	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	221	54.528.000,00
			05	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1	24.940.000,00
			05	03	HEWAN	0	0
			05	04	BIOTA PERAIRAN	0	0
			05	05	TANAMAN	0	0
			05	06	BARANG KOLEKSION BUDAYA	0	0
			05	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	339.677.000,00
			06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			06	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			07		AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0
			07	01	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DANMESIN	0	0
			07	02	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
0			7	03	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN,JARINGAN DAN IRIGASI	0	0
			7	04	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0	0
2	1	5			ASET LAINNYA	18	406.020.000,00
			2		KEMITRAAN DENGAN PIHAKKETIGA	0	0
			2	01	KEMITRAAN DENGAN PIHAKKETIGA	0	0
			3		ASET TIDAK BERWUJUD	5	394.500.000,00
			3	01	ASET TIDAK BERWUJUD	5	394.500.000,00

			4		ASET LAIN-LAIN	13	11.520.000,00
			4	01	ASET LAIN-LAIN	13	11.520.000,00
			5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			5	01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0
			6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
			6	01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	0
					TOTAL	3.203	63.207.806.917,69

Sumber: Data Aset BPBD DIY Tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 20 (dua puluh) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Secara kuantitatif rasio perangkat komputer : 256 Unit

Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Tabel I.4.3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0	Rp0	

4	1	0 2	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp23.034.996.237	Rp22.162.387.611	Rp872.608.626 (Berkurang)
5	1	0 1	Belanja Pegawai	Rp10.638.309.297	Rp9.791.425.164	Rp846.884.133 (Berkurang)
5	1	0 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.182.488.340	Rp11.196.763.847	Rp14.275.507 (Bertambah)
5	1	0 5	Belanja Hibah	Rp1.163.298.600	Rp1.123.298.600	Rp40.000.000 (Berkurang)
5	2		BELANJA MODAL	Rp 0	Rp50.900.000	Rp50.900.000 (Bertambah)
5	2	0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp169.581.600	Rp169.581.600	Tidak bertambah/berkurang
5	2	0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	
5	2	0 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp0	
			Jumlah Belanja	Rp23.204.577.837	Rp22.331.969.211	Rp872.608.626 (Berkurang)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp23.204.577.837)	(Rp22.331.969.211)	Rp872.608.626 (Berkurang)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan terlihat pada Tabel I.4.3 untuk tahun 2023 Anggaran BPBD DIY semula **Rp23.204.577.837,-** dan mengalami perubahan menjadi **Rp22.331.969.211,-** atau berkurang Rp872.608.626,-. Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan BPBD DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. Yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung serta belanja APBD reguler. dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 3.100.043.220,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 9.638.217.174,- dan belanja modal sebesar Rp 1.597.224.080,-

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I. 5.1 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian target kinerja baik program maupun kegiatan yang telah tercapai;	1. Mengintensifkan monev berkala capaian kinerja program/kegiatan (realisasi fisik maupun realisasi keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. Pada Triwulan IV Tahun 2023, capaian realisasi program/kegiatan menduduki peringkat 32 dari 37 OPD
2.	Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan serta monitoring dan evaluasi guna mendukung pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DIY	1. Manajemen kinerja menjadi bagian dari pembinaan pegawai. 2. Pembaruan daftar resiko berdasarkan potensi resiko dan LHP Inspektorat. 3. Reviu SKP pada beberapa jabatan agar inline dengan kinerja atasan. 4. Peningkatan kualitas pengukuran dan data capaian kinerja.

Untuk meningkatkan pencapaian target kinerja baik program maupun kegiatan dengan mengintensifkan monev berkala capaian kinerja program/kegiatan (realisasi fisik maupun realisasi keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Tindak Lanjut hasil evaluasi dalam manajemen kinerja dengan baik adalah

1. Manajemen kinerja menjadi bagian dari pembinaan pegawai.
2. Pembaruan daftar resiko berdasarkan potensi resiko dan LHP Inspektorat.
3. Reviu SKP pada beberapa jabatan agar inline dengan kinerja atasan.
4. Peningkatan kualitas pengukuran dan data capaian kinerja.

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Sasaran Kinerja BPBD DIY,

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Tabel II. 1 Sasaran Kinerja BPBD DIY Tahun 2023

OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output
BPBD DIY	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Tabel II. 2 Indikator Pendukung Sasaran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kapasitas ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 3 Strategi dan Arah Kebijakan

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana di DIY	1) Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan
		2. Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat	2) Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya
		3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana	3) Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Penanggulangan Bencana DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 2 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran		Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp13.463.847.037	Rp12.484.527.864	(Berkurang) Rp979.319.173
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp137.340.900	Rp131.740.900	(Berkurang) Rp5.600.000
		1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 48.590.000	Rp48.590.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
		1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 32.975.000	Rp31.375.000	(Berkurang) Rp1.600.000
		1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 55.775.900	Rp51.775.900	(Berkurang) Rp4.000.000
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.606.998.897	Rp9.799.544.764	(Berkurang) Rp807.454.133
		2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.573.209.297	Rp9.726.325.164	(Berkurang) Rp846.884.133
		2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 42.600.000	Rp42.600.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.374.600	Rp9.374.600	(Tidak bertambah/ berkurang)	

	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 1.815.000	Rp21.245.000	(Bertambah) Rp19.430.000
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp22.500.000	Rp22.500.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 22.500.000	Rp22.500.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp370.828.400	Rp370.828.400	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 18.526.000	Rp18.526.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 35.984.900	Rp35.984.900	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 41.399.500	Rp41.399.500	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.162.000	Rp6.162.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 268.756.000	Rp268.756.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp56.557.000	Rp56.557.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 56.557.000	Rp56.557.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.553.681.000	Rp1.407.466.200	(Berkurang) Rp146.214.800
	6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 670.000.000	Rp523.785.200	(Berkurang) Rp146.214.800

		6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 883.681.000	Rp883.681.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp695.940.840	Rp695.890.600	(Berkurang) Rp50.240
		7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 331.017.700	Rp141.140.000	(Berkurang) Rp189.877.700
		7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 113.482.740	Rp303.360.200	(Bertambah) Rp189.877.460
		7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 251.440.400	Rp231.440.400	(Berkurang) Rp20.000.000
		7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0	Rp19.950.000	
		Total Anggaran Pendukung	Rp13.463.847.037	Rp12.484.527.864	(Berkurang) Rp979.319.173
	2.	1.1.1 Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rp1.423.157.300	Rp1.714.081.300	(Bertambah) Rp290.924.000
	3.	1.1.1.1 Program penanggulangan bencana	Rp8.303.463.800	Rp8.046.093.047	(Berkurang) Rp257.370753
	4.	1.1.1.1. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Rp87.267.000	Rp 87.267.000	(Tidak bertambah/ berkurang)
		Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		Rp23.277.735.137	Rp22.331.969.211

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan BPBD DIY Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY .

Pada tahun 2023, BPBD DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Sasaran dan Target Perjanjian Kinerja BPBD DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)
2.	Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	Triwulan I	80
					Triwulan II	80
					Triwulan III	80
					Triwulan IV	81*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

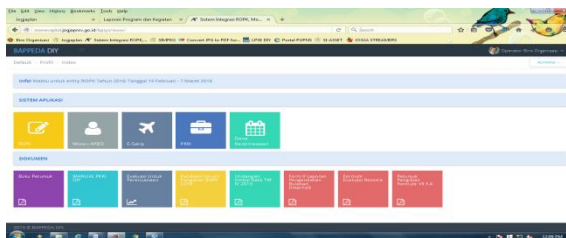
No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penataan Organisasi (APBD)	Rp. 12.484.527.864,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp. 8.046.093.047,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Keadakan dan Non Kebakaran	Rp. 87.267.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 1.714.081.300,00
	Jumlah Anggaran	Rp 22.331.969.211,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



BAB III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Bab 3 Berisi :

- Capaian Kinerja Tahun 2022
- Realisasi Anggaran
- Inovasi
- Lintas Sektor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Pelaksana BPBD DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	realisasi 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
					TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indikator: Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	80	81	85,08	105,04	Sangat Baik	84
	Meta indicator: Nilai Kapasitas Ketahanan Daerah								
Meninkanya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	Indeks	A	A	A	A	100	Sangat Baik	A

Tabel III. 3. Gambaran Umum Nilai Kapasitas Daerah sebagai Meta Indikator Kinerja

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja PB	2022	2023 Hasil Penilaian	2023 (verifikasi)	Kelas
1	Provinsi DIY	IKD	0,63	0,66	0,67	Sedang
2	Kota Yogya	IKD	0,62	0,76	0,68	Sedang
3	Kab Sleman	IKD	0,60	0,95	0,70	Sedang
4	Kab Bantul	IKD	0,50	0,64	0,58	Sedang
5	Kab Kulon Progo	IKD	0,63	0,65	0,65	Sedang
6	Kab Gunungkidul	IKD	0,66	0,72	0,73	Sedang

Kelas Rendah rentang nilai : 0,20-0,40

Kelas Sedang rentang nilai : 0,41-0,80

Kelas Tinggi rentang nilai : 0,81-1.00

3.2 Sasaran 1.: Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana

Capaian kinerja meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana diukur dengan satu indikator yakni Indeks Ketahanan Daerah. Nilai indeks ketahanan daerah diperoleh melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 Hubungan Sasaran, indicator dan meta indikator

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Kapasitas Daerah di DIY

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditujukan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan daerah untuk meredam risiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
2. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana;
3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.5 Sasaran, Indikator dan Meta Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2021	Capaian 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	<u>Indikator:</u> Indeks Ketahanan Daerah <u>Meta Indikator:</u> Nilai Indeks Kapasitas Ketahanan Daerah di DIY	Angka	79	80	81	85,08	105,04	Sangat Baik	84

Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja sasaran meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah, dengan tolok ukur sasaran capaian meningkatkan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana diukur dengan 1 (satu) indikator Indeks Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana.

Penjelasan Formulasi perhitungan nilai kapasitas daerah sebagai data meta indikator capaian kinerja tahun 2023 dengan rumusan sebagai berikut:

Tabel III. 6. Formulasi Perhitungan Nilai Kapasitas Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meningkat	Nilai Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	(50% Desa Tangguh Bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi) dikali 100

Tabel III. 7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d2022 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	80	81	85,08	105,04	84	$85/80*100=$
					$(82/85*100)$		106,25
2	Nilai Indeks Kapasitas Ketahanan Daerah di DIY	0,63	0,66	0,67	$(0.66/0,67*100)$	0,66	$(0.66/0,67*100)=$

Keterangan kolom (6): nilai indeks ketahanan daerah tercapai melebihi target yang ditentukan sebesar 1,2.

Berdasarkan Tabel III.6 Realisasi Kinerja Tahun 2023, dapat dilakukan analisis atas sasaran “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana” sebagai berikut :

- Target diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah tercapai 82 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 104% maka target tahun 2023 tercapai melebihi target.
- Dibandingkan realisasi tahun lalu 82 (98,5%), capaian tahun ini sebesar 85 terdapat kenaikan sebesar 6 %.
- Dibandingkan dengan target akhir RPB saat ini mencapai 100% dari target, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai sesuai target Indeks Ketahanan Daerah dengan skor 85 pada akhir Tahun 2023 dari target akhir RPB 2022-2027.
- Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
Pelayanan informasi rawan bencana	Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana	100%	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas /ketangguhan warga terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasiterhadap korban bencana	penyelamatan dan evakuasiterhadap korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasiterhadap korban bencana	100%	100%	100%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,4	
	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	100	99,9	
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	100	99,97	
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 dokumen	100	99,97	
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	100	99,78	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	100	99,01	

	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100	98,87
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen tahunan	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	100	94,44
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 paket	100	99,94
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 paket	100	99,98
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	100	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen	100	86,02
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	100	99,97
	6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	100	99,1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 dokumen	100	89,82
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 dokumen	100	99,06
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	100	93,58

	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	100	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 dokumen	100	100
2. Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana			
	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1 dokumen	100	96,58
	2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	1 dokumen	100	84,32
	3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	810 orang	100	97,52
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	2 dokumen	100	77,65
	2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	280 orang	100	82,36
	3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 dokumen	100	96,4
	4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	60 unit	100	94,33
	5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10 kawasan	100	95,66
	6. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	100	94,03
	7. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	100	94,08

	8. Penanganan Pasca Bencana Provinsi	2 dokumen	100	63,66
3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	1. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 dokumen	100	97,71
	2.Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 dokumen	100	97,71
4.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			
	1. Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1 dokumen	100	100
	2.Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1 dokumen	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
	1.Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2 dokumen	100	96,37
	Jumlah		100	96,2

Nilai Indeks Ketahanan Daerah merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan resiko bencana; dan penilaian indeks ketahanan daerah ditunjukkan untuk memberikan dasar yang kuat dalam peningkatan indeks ketahanan

daerah untuk meredam resiko bencana. Penilaian indeks ketahanan daerah meliputi:

1. Penilaian regulasi, perencanaan dan kelembagaan;
2. Penilaian system informasi dan peringatan bencana;
3. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
4. Penilaian upaya pengurangan fakkor-faktor resiko bencana;
5. Penilaian upaya kesiap-siagaan daerah untuk penanggulangan bencana;

**Penjelasan atas perhitungan Indeks Ketahanan Daerah terlampir*

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah (indikator sasaran BPBD DIY).

Strategi-strategi BPBD DIY untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2022-2026, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

Ketercapaian kinerja sasaran didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

A. Melaksanakan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2023 dengan target 5 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swasta terdiri dari 55 hingga tahun 2022 ditambah 5 di tahun 2023 seluruhnya sudah terbentuk 60 lokasi SPAB .

Adapun di tahun 2023 terbentuk 5 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) dimaksud adalah:

1. MA Ali Maksum, Bantul
2. SLB Citra Mulia Mandiri, Sleman
3. SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
4. SMKN 6 Yogyakarta
5. SMAN 2 Yogyakarta

B. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana

Sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 25 (lima) kalurahan/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY. Adapun Desa/Kalurahannya adalah sebagai berikut:

Pelatihan Masyarakat Tanggap Bencana Khususnya Daerah Rawan Bencana Tahun 2023 di lakukan di 13 Kalurahan. Menggunakan anggaran kegiatan dari APBD DIY yang merupakan pokok pikiran DPRD DIY, melalui kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Tahun 2023;

1. Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
2. Kalurahan Bandungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
3. Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.
4. Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul.
5. Kalurahan Wirobrajan, Kemanten Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
6. Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
7. Kalurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjp, Kota Yogyakarta.
8. Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.
9. Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.
10. Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.
11. Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

- C. Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana menjadi 10 detik.

Penghitungan rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana pada program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana merupakan hasil penghitungan waktu yang dibutuhkan petugas penerima laporan untuk memverifikasi laporan dan sampai adanya petugas penanganan di lapangan.

Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana dihitung dari penghitungan kecepatan waktu respon penanganan laporan dari kejadian utama yang dilaporkan (angin kencang, tanah longsor, kebakaran, banjir, banjir lahar dingin, gelombang pasang dan abrasi) di lima kabupaten/kota yang merupakan akumulasi dalam satu tahun.

- D. Indeks Pemulihan Pascabencana sebesar 135%.

Berdasarkan nilai DRI pada masing-masing kabupaten dan diperoleh nilai DRI Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu sebesar 135%. Capaian tersebut naik sebesar 2,56% dari capaian tahun 2022 dengan capaian 132,44%. Capaian DRI sebesar 135% tersebut merupakan tingkatan tertinggi berdasarkan standar klasifikasi perhitungan tingkat DRI suatu daerah.

Faktor Pendukung keberhasilan;

- a. Koordinasi dengan BPBD Kab/Kota berjalan dengan baik
- b. Koordinasi dengan Stakeholder terkait PB berjalan baik
- c. Koordinasi dengan akademisi berjalan dengan baik
- d. Koordinasi dengan Pokja BLP berjalan dengan baik

- e. Pendampingan oleh Tim Inspektorat
- f. Pendampingan pelaksanaan Hibah oleh BPKA dan Bappeda
- g. Sudah ada panduan penyelenggaraan SPAB dan Destana/Kaltana, dan penilaian indeks ketahanan daerah

Faktor Penghambat keberhasilan (*Jika indikator kinerja tidak tercapai*) :

- a. Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai : Kesulitan suku cadang Sweeper truck, dan ATV
- b. Dalam kegiatan Destana tidak disediakan dukungan baju identitas bagi relawan yang sudah dilatih.
- c. Menyesuaikan jadwal akademik untuk kegiatan SPAB

3.3 Sasaran 2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023)	A	A	A (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023)	100%	A	100%

Keterangan kolom (5) adalah: Angka realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung (sesuai dengan meta indikator) untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Keterangan kolom (6) adalah: Angka %realisasi 2023 dilengkapi dengan cara menghitung untuk mendapatkan hasil capaian kinerja

Adapun Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023

Tabel III.11. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023

No	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	83,77	5,81	89,58	A	Memuaskan	84,76	83,97
2	Biro Hukum Setda DIY	83,93	5,30	89,23	A	Memuaskan	83,55	81,75
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,97	5,41	92,38	A	Memuaskan	83,91	83,9
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,04	4,63	87,67	A	Memuaskan	83,43	82,01
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,46	8,00	91,46	A	Memuaskan	81,68	71,8
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	85,25	6,49	91,74	A	Memuaskan	83,38	77,87
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,67	4,50	88,17	A	Memuaskan	82,39	81,59

8	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Setda DIY	83,39	5,25	88,64	A	Memuaskan	82,51	80,29
9	Paniradya Kaistimewan	86,75	6,43	93,18	A	Memuaskan	82,84	79,26
10	Sekretariat DPRD DIY	77,60	4,33	81,93	A	Memuaskan	82,75	77,75
11	Inspektorat DIY	86,83	6,30	93,13	A	Memuaskan	86,43	85,32
12	Dinas Pariwisata DIY	82,67	5,73	88,40	A	Memuaskan	78,73	77,15
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	85,72	6,87	92,59	A	Memuaskan	83,77	82,86
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	83,43	8,07	91,50	A	Memuaskan	82,90	81,34
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	82,60	6,97	89,57	A	Memuaskan	83,90	82,09
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,95	6,81	90,76	A	Memuaskan	83,20	81,31
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	84,74	6,71	91,45	A	Memuaskan	84,35	81,94

19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	81,34	6,91	88,25	A	Memuaskan	82,15	77,75
20	Dinas Perhubungan DIY	83,79	5,25	89,04	A	Memuaskan	81,56	78,3
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	85,39	4,80	90,19	A	Memuaskan	80,70	76,54
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,71	8,25	94,96	A	Memuaskan	84,66	82,18
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	86,42	6,17	92,59	A	Memuaskan	83,65	81,81
24	Dinas Kesehatan DIY	86,10	6,62	92,72	A	Memuaskan	84,26	83,17
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	76,32	6,10	82,42	A	Memuaskan	82,75	79,97
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	84,42	2,36	86,78	A	Memuaskan	82,74	81,13
27	Dinas Sosial DIY	86,13	7,00	93,13	A	Memuaskan	83,85	81,59
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,35	4,24	86,59	A	Memuaskan	81,84	76,58
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	84,43	5,52	89,95	A	Memuaskan	83,43	82,6

30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,91	4,00	85,91	A	Memuaskan	80,81	77,27
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,11	7,32	95,43	A	Memuaskan	84,80	84,23
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	88,56	5,85	94,41	A	Memuaskan	82,73	75,73
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	90,47	4,10	94,57	A	Memuaskan	85,45	84,31
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	87,61	4,44	92,05	A	Memuaskan	84,63	82,44
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	83,74	4,97	88,71	A	Memuaskan	80,54	74,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,20	3,65	85,85	A	Memuaskan	76,07	71,24
37	Badan Penghubung Daerah DIY	79,88	2,53	82,41	A	Memuaskan	81,69	76,51
	Nilai Rata-Rata	84,24	5,66	89,90			82,87	80,02

Tabel III.12 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai RPD 2023-2026 disebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah DIY untuk mengakomodir penanggulangan bencana dalam pembangunan telah ditunjukkan dengan menempatkan isu penanggulangan bencana daerah sebagai bagian dari Tujuan Pertama RPD 2023-2026 yaitu meningkatnya kesejahteraan Sosisioekonomi dan sosiokultural masyarakat dengan sasaran RPD 2023-2026 , penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengelolaan resiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan Kapasitas untuk masyarakat. Penguatan kapasitas di Desa/Kalurahan/Kelurahan adalah upaya setrategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.

Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utana BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012, program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan program pemberdayaan Desa/Kalurahan/Kelurahan menuju masyarakat tangguh bencana. Untuk itu, kerjasama semua pemangku kepentingan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat tangguh bencana.

Dalam mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Tangguh Bencana adalah meningkatkan ketahanan daerah yang terlihat dalam tolok ukurnya adalah peningkatan Nilai Indeks Kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, untuk perhitungan skor Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian Kinerja yang dilakukan BPBD DIY di tahun 2023 yang mendukung kontribusi pencapaian terhadap sasaran kerja pemerintah daerah berhubungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 3.1 Capaian Kinerja OPD dengan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2023

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	WTP AA	*) WTP AA	Terwujudnya kelembagaan istimewa yang Agile	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	75%	100%
					Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana	Meningkatnya Nilai Indeks Ketahanan Daerah	81	85

Sebagaimana Tabel III.3.1 Sesuai amanat cascading Kinerja BPBD DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.

Tabel III.3.2 Capaian Kinerja Lainnya yang diampu oleh BPBD DIY

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bantuan Air Bersih dalam Penanggulangan Bencana	Terpenuhi nyadan terkondisinya kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana selama 5 tahun	Mengurangi resiko terdampak bagi warga masyarakat miskin	Terwujudnya penguatan kemampuan finansial bagi warga miskin dan pengurangan terdampak bencana	Di tahun 2023 sdh tidak ada lagi warga yang menjual hewan ternak mereka untuk membeli kebutuhan air bersih	75%	100%

Sebagaimana **Tabel III. 3.2** Program yang dilaksanakan oleh BPBD DIY yang merupakan bagian dari SDG'S yaitu terkait dengan pemberian bantuan/ dropping air layak konsumsi kepada warga miskin yang terdampak kekeringan saat musim kemarau di tahun 2023, sebanyak 30 mobil tangki (12.000 liter) air tersalurkan kepada warga miskin terdampak, pengurangan dampak resiko kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi wilayah yang kondusif serta tangguh menghadapi bencana merupakan sasaran kerja yang sangat mendukung terhadap capaian sasaran kerja pemda DIY lebih baik, sebagaimana yang sudah tercapai :

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. BPBD DIY ikut berperan sebagai penunjang ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi, dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tangguh bencana di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik.

3,5 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya a ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	82	85	104	14.159.787.877	13.180.368.464	92,72	979.419.413
Jumlah						14.159.787.877	13.180.368.464	92,72	979.419.413
Total Belanja Operasional						14.159.787.877	13.180.368.464	92,72	979.419.413

Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Th 2022, Laporan Keuangan BPBD DIY Th 2023

Berdasarkan Tabel III.5 di atas capaian kinerja sasaran BPBD DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp14.159.787.877,00 terealisasi Rp13.180.368.464,00 atau 92,72 % sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 979.419.413,00 atau 10,28% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber

3.6 Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi

1. E-SAKIP

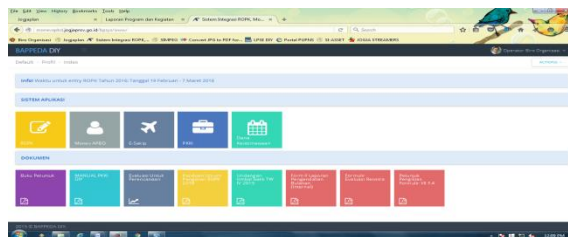
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana

Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

2. *sungguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan, SIPKD yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah, serta aplikasi
3. E-Lapor DIY untuk mengelola layanan aduan.

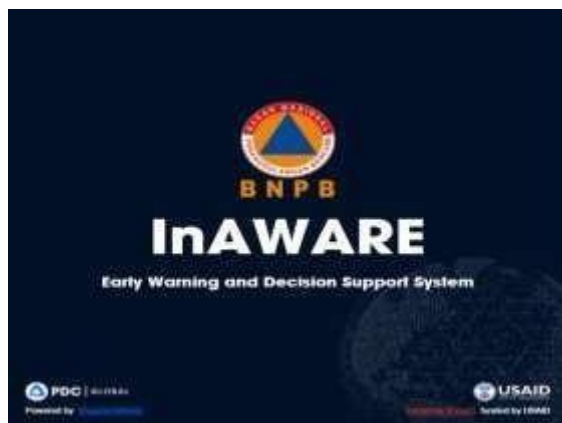
Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi **InaWARE** dan **DIBI** yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi **PAMOR** yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY.

Gambar III.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber:<http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

Gambar III.2 Sistem informasi kebencanaan InaWARE



Sumber:<https://inaware.bnpb.go.id/inaware/>

Gambar III.3 Sistem informasi kebencanaan DIBI



Sumber: <http://bnpb.cloud/dibi/>

Gambar III.4 Sistem informasi kebencanaan



Sumber: <http://pamor.jogjaprovo.go.id/>

3.7 Program Penunjang

Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD DIY dengan fasilitas yang ada menghadapi bencana kekeringan di saat musim kemarau tahun 2023, melakukan Program dropping air Siap Tangguh Atasi Kekeringan (**SITANGKI**). Program "**SITANGKI**" dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2023 oleh BPBD DIY yang telah melakukan distribusi air sebanyak 1200 liter air setara dengan 30 tangki kepada warga masyarakat terdampak kekeringan. Pembuatan sumur bor di 24 titik di Kabupaten Gunung Kidul yang sedang proses dalam sosialisasi kepada masyarakat. Pengelolaan embung atau bendungan program pengelolaan embung bendungan dengan melakukan sosialisasi dengan pemanfaatan air di embung secara efektif atau ekonomis sehingga tetap dapat terpenuhi kebutuhan air yang dapat mengairi pertanian dan kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sosial lainnya. Kondisi yang lebih baik yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 tidak ada lagi warga masyarakat yang sampai menjual hewan ternak mereka demi untuk membeli air untuk konsumsi (*domestik*).

3.8 Program Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka BPBD DIY

sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung BPBD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.4 Inventarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Manfaat bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Dukungan Pelaksanaan Launching 55 SPAB(Satuan Pendidikan Aman Bencana) di DIY	Badan Musyawarah Perbankan Daerah	Bantuan Peralatan berupa HT pada saat Launching SPAB		55 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diluncurkan	Alat Komunikasi yang dapat dipakai pada saat bencana
2	Informasi kondisi cuaca, gempa, dan iklim	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat
3	Informasi Perkembangan dan kondisi Gunung Merapi	BPPTKG	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat

BAB IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

Hasil laporan kinerja BPBD DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uraikan hambatan permasalahan kinerja (dapat diidentifikasi dari factor man, money, material, method, machine; factor proses manajemen: *planning, organizing, actuating, controlling*; faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan.
2. Uraikan faktor kunci keberhasilan.

Beberapa faktor keberhasilan pekerjaan antara lain kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mandat kinerja dengan kolaboratif dalam mencapai target kinerja serta Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Lintas Sektor (*Pentahelix*)

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan bencana;
2. Melakukan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor utama pembangunan daerah;
3. Melakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural;
4. Memastikan kesiapan sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. Melakukan kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana.

6. Mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang terstandarisasi;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana;
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan darurat bencana;
9. Mengembangkan mekanisme pemulihan pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana dan berkelanjutan.

4.2 Langkah-langkah Perbaikan Kinerja

1. Satunya tujuan yaitu keberhasilan atas pencapaian target kinerja.
2. Meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah yang meliputi :
 - a) Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
 - b) Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana;
 - c) Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
 - d) Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
 - e) Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelaksanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta										
Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Meningkatnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat	Indeks Risiko Bencana (IRB)			106,78	104,78	102,78	100,78	98,78	96,78
			Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	80	81	82	83	84	84
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di	Kategori RB Perangkat Daerah (A)	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023- Januari



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206
Website: bpbdd.jogjapro.go.id, Email: bpbdd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
Gubernur
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelaksana BPBD DIY,
Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si
NIP. 196306171989091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memangkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,85 0,85 0,85 0,85*)
2	Memangkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RIB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	A A A A*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana terdapat di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPBD	Anggaran
1.	Program Pemangkuhan Bencana (APBD)	Rp 8.303.463.800,00
2.	Program Penguatan, Peningkatan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 87.267.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Keselamatan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 1.350.000.000,00
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (APBD)	Rp13.463.847.037,00
	Jumlah Anggaran	Rp23.204.577.837,00

*) Data capaian kinerja terdapat pada simulasi IV karena bersifat outcome.



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023- Juli



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alamat: Jalan Sumari No. 10A Yogyakarta, Telp (0271) 433333, Fax (0271) 524120
Website: <http://www.bpd.go.id>, Email: BPBD@bpd.go.id, BPBD@bpd.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilayani, khususnya dan seluruhnya serta terlaksananya pada tahun ini, maka yang terdapat tertera di bawah ini :

Nama : Drs. MURNAN PURNADARMA
Jabatan : P.L.T. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal
Unit Kerja : Badan POKAC KABUPATEN

Nama : SAMSULHADI SAMUDRA
Jabatan : Koordinator Bidang Informasi Teknologi
Unit Kerja : POKAC KABUPATEN, Unit Kerja/Bidang POKAC KECAMATAN

POKAC KABUPATEN pada tahun 2023 ini bertujuan akan dilaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan rencana kegiatan perubahan di dalam tahun ini, dalam rangka pencapaian target kinerja yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilaksanakan secara profesional.

Kebijakan yang diharapkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah tercapainya prestasi yang baik.

POKAC KABUPATEN akan melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam akan melaksanakan rencana tindakan yang akan dilaksanakan di dan luar lingkungan Kabupaten Tegal dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

POKAC KABUPATEN

KECAMATAN



Yogyakarta, Juli 2023

POKAC KABUPATEN

KECAMATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target Tahunan (4)	Triwulan (5)	Target (6)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,65	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	0,65 0,65 0,65 0,65
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di ERBO DIY	Kategori PBG Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	A A A A ¹⁾

Keterangan:

- Urut mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat di dalam anggaran anggaran sebagai berikut.

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Bencana (JPBEO)	Rp 8.303.463.800,00
2.	Program Pemangkuhan, Penyelenggaraan, Penyediaan Ketahanan dan Penyelamatan Non Ketahanan	Rp 87.267.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Yogyakarta Urusan Ketahanan	Rp 1.340.000.000,00
4.	Program Pemangkuhan Urusan Pemerintahan Daerah (JPBEO)	Rp13.463.847.037,00
	Jumlah Anggaran	Rp23.204.577.837,00

¹⁾Data capaian kinerja tertera pada triwulan IV karena bersifat outcome.



Lampiran 4. Evaluasi LKj IP Tahun 2023 full dengan tanda tangan

Lampiran 5 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2023 kop full



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**